

OPTIMISME

MENYAMBUT PEMILU TAHUN 2024

Opini

Mengawal Inklusi 26
dalam Pesta Demokrasi

Berita Utama

Bawaslu Karanganyar
16 Gelar Apel Siaga Pengawasan
Tahapan Kampanye Pemilu 2024



EDISI 8 | 2023

Daftar Isi

- 03 **SALAM REDAKSI**
04 **PROFIL PIMPINAN**
07 - Bawaslu RI Gelar Forum Warga di Empat Kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar
08 **HASIL PENGAWASAN**
- Rentan Pemilih Terabaikan, Jajaran Bawaslu Karanganyar Awasi Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
10 **PENYELESAIAN SENGKETA**
- Kebakkramat Raih Juara Favorit II
11 - Bawaslu Jadi ujung Tombak Penyelesaian Sengketa
12 - Bawaslu Gelar Rapat Penyelesaian sengketa Proses Pemilu Tahun 2024
13 - Optimalkan Pencegaha, Bawaslu Karanganyar Deklarasi Relawan Cyber
14 **MEDIA SOSIAL**
- Optimalkan Fungsi Pencegahan, Bawaslu Karanganyar Berikhtiar Minimalisir Terjadinya Pelanggaran Pemilu
15 - Pencegahan Hukum Terhadap Hoaks Dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dalam Pemilu
16 **BERITA UTAMA**
- Bawaslu Karanganyar Gelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024
18 **SOSIALISASI BAWASLU**
- Wujudkan Pemilu Inklusif, Bawaslu gandeng Kelompok Disabilitas
- Bawaslu Aktifkan Lagi Desa Pengawasan dan desa Anti politik Uang
19 - Pemilih Pemula Digandeng Awasi Pemilu 2024
- Masyarakat Dan Ormas Diajak Awasi Tahapan Pencalonan
20 - Bawaslu Karanganyar Hadiri Sosialisasi & Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2024
- Bawaslu Karanganyar Libatkan Dharma Wanita Awasi pemilu 2024
21 - Bawaslu Karanganyar dan DPR RI Komisi 2 Lakuakan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
- Bawaslu Ajak Perempuan Aktif Awasi Pemilu
22 - Gakumdu Satukan Persepsi Soal Regulasi
24 - SDM Bawaslu Terampil Dan Berdedikasi Jaga Pemilu
25 - Bawaslu Awai Pendaftaran Peserta Pemilu 2024
26 **OPINI**
- Mengawal Inklusi Dalam Pesta demokrasi
28 **GALERI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**
30 **HIBURAN**
- Sajak Demokrasi



Dewan Pengarah :

Nuning Ritwanita Piliastuti, S.H.,M.H.
Danang Eko Kristiyanto, S.E
Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.
Dini Tri Winaryani, S.Sos

Penanggung Jawab

Sudarsono, S.Fil.I

Redaktur

Endroko, S.E.

Editor

Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.

Desain Grafis, Fotografer & Layout

Joko Susilo, S.Kom.

Kontributor

Rofi' Rasyidah, S.H.
Vondra Surya Dananjaya, S.H.
Argo Teguh Herjantoro, S.P.
Dayinta Atindriya, S.E.
Wisnu Sri Nugroho, S.H.
Eko Wahyoto
Dwi Astuti, S.E
Magang mbkm UNS

SALAM REDAKSI

Hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 tidak lama lagi akan digelar, kurang dari 2,5 bulan masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin-wakil rakyat mulai dari memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah tanggal 14 Februari 2024 Pemilu nasional digelar, masyarakat kembali disibukkan untuk menentukan pemimpinya di level lokal atau bisa disebut Pemilu lokal (Pilkada). Pelaksanaannya, berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, Komisi II DPR, dan penyelenggara Pemilu akan digelar tanggal 27 November 2024.

Sebab tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak baik nasional ataupun lokal, sebuah keharusan bagi lembaga penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu untuk berbenah menjadi lebih baik. Upgrading pengetahuan kepemiluan dan kepengawasan pada level komisioner dan kesekretariatan hingga jajaran kecamatan dan kelurahan/desa terus dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat (partisipatif) baik melalui forum-forum dan platform media sosial turut menghiasi dalam satu tahun ini.

Selain hal di atas, beragam model pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu seperti pengawasan calon peserta Pemilu 2024, calon DPD, penataan dapil dan alokasi kursi, data pemilih, calon legislatif, dan sebagainya tidak luput dari pengawasan Bawaslu Karanganyar. Bahkan dekade tahun 2023, Bawaslu Karanganyar telah meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak dua kasus.

Tepat tanggal 19 Agustus 2023, Bawaslu Republik Indonesia melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia masa periode 2023-2028. Untuk Bawaslu Karanganyar, komposisi komisioner di dominasi wajah lama yaitu sebanyak tiga orang dan dua orang diisi wajah baru. Kendati demikian, kolaborasi dan saling bersinergi satu sama lain memberi

optimisme dan tentunya semangat baru dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Buletin Gerbang Demokrasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar edisi VIII kali ini tentu memuat beragam kegiatan Bawaslu selama satu tahun (2023). Tentu tidak semua kegiatan dapat terhimpun di edisi VIII dengan pertimbangan salah satunya, jumlah halaman yang terbatas dan lebih memprioritaskan kegiatan yang sifatnya memiliki nilai tawar lebih dalam hal pemberitaan.

Atas nama lembaga, permohonan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan tentu saran maupun masukan dari semua pihak menjadi sangat berarti untuk kebaikan lembaga kedepan. Selamat membaca!

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



Nuning Ritwanita P., S.H., M.H.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Profil Pimpinan Bawaslu Karanganyar (2023-2028)



Nama : Nuning Ritwanita P., S.H., M.H
Lahir : Karanganyar, 3 April 1975
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Email : sweet.difa75@gmail.com

Wanita alumni SMA N 1 Karanganyar, melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang dengan mengambil Jurusan Hukum. Sebagai bentuk pengabdian keilmuannya kepada masyarakat, wanita alumni Untag ini bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Wening sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Wening. Pengalamannya dibidang Advokasi Hukum meliputi perkara perdata, perkara pidana, dan HAM. Wanita asal Wonolopo, Tasikmadu ini juga menjabat sebagai Bendahara BPP Penghimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Jawa Tengah. Dalam meningkatkan bidang keilmuan hukum, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Surakarta dengan mengambil Jurusan Magsiter Hukum. Nuning di periode kedua kembali menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Nama : Sudarsono, Fil. I
Lahir : Sumenep, 1 Maret 1984
Jabatan : Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat
Email : suara.sudarsono@gmail.com



Alumni Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, Pangarangan, Sumenep kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Kampus Islam (UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta dengan mengambil studi Aqidah dan Filsafat. Semasa kuliah, Kordiv. Pencegahan Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab. Karanganyar aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Periode 2006-2007, Ketua HMI Cabang Jogjakarta Periode 2007-2008, dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Jateng-DIY Periode 2008-2010, dan Anggota Bidang Internal PB HMI Periode 2010-2012. Semasa kuliah, ia juga terlibat melakukan advokasi pendidikan gratis di DIY bersama kelompok Cipayung dan aktif dalam diskusi, diskusi bersama organisasi buruh, Persatuan Serikat Buruh (PSB). Sebagai perwakilan dari HMI, ia dipercaya menjadi Koordinator Umum (Kordum) aksi 1 May Day Tahun 2008 di Yogyakarta yang melibatkan ribuan massa aksi dari elemen buruh dan organisasi kemahasiswaan. Memasuki dunia profesi pasca menjadi mahasiswa, ayah dari Chiara Azalea Putri Sudarsono dan Muhammad Abhinaya Putra Sudarsono kemudian berkarier di media online sebagai jurnalis dan akhirnya bergabung dengan lembaga penelitian, Indonesian Strategyc Polisy Institute (ISPI) yang konsent pada isu-isu terorisme di Indonesia.



Nama : Danang Eko Kristiyanto, S.E
Lahir : Surakarta, 6 Juni 1982
Jabatan : Anggota/ Koordinator Divisi
SDM, Organisasi dan Pendidikan Latihan
Email : danang.e.kristiyanto@gmail.com

Lahir di Surakarta, 6 Juni 1982, Danang Eko Kristiyanto mengawali kiprah kepemiluannya sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Colomadu Periode 2022-2024. Di Bawaslu Kabupaten Karanganyar periode ini, Danang diamanahi sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Latihan (SDMO Diklat). Sebelumnya, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta (FE UNSA) itu telah berpengalaman selama delapan tahun di bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan di Minahasa, Sulawesi Utara dan Bali.

Ketertarikannya pada bidang demokrasi dan politik sudah terlihat sejak memasuki masa kuliah. Di organisasi intrakampus, Danang tercatat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FE UNSA. Sementara pada organisasi ekstrakampus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisariat GMNI Timur Raya (UNSA) dan berlanjut menjadi Wakil Ketua Wakil Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Surakarta. Kegemarannya menulis membuat buah karyanya diterbitkan di media massa, satunya berjudul Memperkuat Akses Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Tribunnews.com

Nama : Dini Tri Winaryani, S.Sos
Lahir : Surakarta, 22 Januari 1983
Jabatan : Anggota/ Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
Email : diniavila@gmail.com



Meski terbilang baru sebagai penyelenggara Pemilu, namun Dini Tri Winaryani tak asing dengan dunia politik. Sebelum dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Periode 2023-2028, Dini telah lebih dulu bertugas di Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Jaten Periode 2022-2024.

Perempuan kelahiran Surakarta, 22 Januari 1983 itu menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (FISIP) UNS. Semasa kuliah, Dini aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNS, FISIP Fotografi Club (FFC), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP UNS.

Sepuluh tahun berkiprah di bidang jurnalistik membuatnya dekat dengan ragam kebijakan politik dan warna-warni pesta demokrasi yang menyertai. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu pernah tercatat sebagai announcer sekaligus reporter dalam program Universitas-RRI Cabang Surakarta, reporter di Radio RIAFM Solo dan Harian Suara Merdeka, serta redaktur di Harian Joglosemar. Dini juga menjadi bagian dari Tim Penulis Buku Gado-Gado Kerikil Jokowi terbitan Galang Press, Yogyakarta di Tahun 2012.



Nama : Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H
Lahir : Karanganyar, 16 Maret 1988
Jabatan : Anggota/ Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran & Data Informasi
Email : cocozonee@gmail.com

Menjadi bagian dari jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar termuda di Jawa Tengah. Pada usia 30 tahun 5 bulan dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yang membidangi Divisi Hukum, Data dan Informasi. Lulusan S1 Program Study Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 dan menyelesaikan jenjang Pasca Sarjana Magister Hukum di Universitas Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, mulai mengajar di MI dan MTs Ma'arif NU Mojogedang, Karanganyar. Mengampu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala MI Ma'arif NU Mojogedang. Meniti karier di dalam kepengawasan pemilu mulai dari menjadi PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Desa Bangsri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013, Pemilu 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Karangpandan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018. Menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar masa kerja 2018 - 2023 dan 2023 - 2028



Bawaslu RI Gelar Forum Warga di Empat Kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan Forum Warga Pengawasan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Panitia local yang ditunjuk tentu Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kegiatan Forum Warga Pengawasan digelar di dua tempat, Kecamatan Ngargoyoso dan Karangpandan, Kamis (26/10/2023).

Tempat pertama diadakan di Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan kemudian dilanjutkan pada sore hari di Blowing Resto, Kecamatan Ngargoyoso. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula, dan kelompok perempuan.

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Arif Rahman Hakim membuka kegiatan sosialisasi partisipatif kemudian dilanjutkan meteri dari Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, Ikhsan Nur Isfiyanto, dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karanganyar, Sri Harjono.

Sri Harjono menyampaikan bahwa tugas masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dapat dimulai dari lingkungan terdekat masing-masing. Sementara menurut Ikhsan, Bawaslu saat ini lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam menangkal potensi dugaan pelanggaran Pemilu. Senada dengan Iksan, Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti mengajak masyarakat untuk mengambil peran menjadi pengawas partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang sesuai amanat Undang-undang 7 tahun 2017.

Bertempat di Harmet si Jambe Resto, Kerjo (11/11/2023) Bawaslu RI kembali berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Kegiatan 'Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Sukses Pemilu 2024'. Untuk keempat kalinya, kegiatan Forum Warga yang digagas Bawaslu RI kembali dilaksanakan di Kecamatan Tawangmangu tepatnya di Rahma Café, Minggu (17/12/2023). Beragam kelompok masyarakat yang hadir sebagai peserta dengan jumlah 100 peserta memberi optimisme bahwa pengawasan Pemilu 2024 akan berjalan maksimal karena melibatkan masyarakat luas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan Pemilu menjadi tugas bersama yang tidak hanya milik Bawaslu. Untuk itu, Nuning mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan, terlebih pada masa tahapan kampanye dan hari tenang. Jika kemudian masyarakat mendapatkan dugaan pelanggaran di wilayahnya masing-masing, agar bisa melaporkan kepada pengawas Pemilu terdekat atau bisa langsung melaporkan kepada Bawaslu Karanganyar.

Rentan Pemilih Yang Terabaikan, Jajaran Bawaslu Karanganyar Awasi Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih

Permasalahan mengenai daftar pemilih merupakan hal yang harus dituntaskan untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 guna terpenuhinya prinsip akurat, mutakhir, dan aksesibel. Bawaslu Karanganyar dan jajaran pengawas melakukan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu yang Memiliki kewenangan untuk melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah Patroli Kawal Hak Pilih.

Kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih diawali dengan apel patroli pengawasan yang dilaksanakan serentak tanggal 27 Februari 2023. Apel patroli bertujuan agar pengawas pemilu senantiasa membuka mata melaksanakan pengawasan di lapangan dan mengetahui potensi pelanggaran serta wajib melakukan pencegahan pelanggaran dan tidak segan untuk menindak pelanggaran. Patroli pengawasan dengan cara mendatangi pemilih rentan secara langsung. Mengingat, petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) telah memulai melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sejak tanggal 12 Februari 2023 di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Karanganyar turut mengawasi pelaksanaan coklit yang dilakukan KPU terhadap tokoh masyarakat seperti Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Ketua DPRD

Kabupaten Karanganyar, Akademisi dan Aktivis Gender, dan Penyandang Disabilitas. Kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih tersebut dilakukan pada tanggal 01 Maret sampai tanggal 14 Maret 2023. Fokus pengawasannya meliputi kepatuhan prosedural Pantarlih saat melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung dengan menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit, coklit dilaksanakan tidak tepat waktu, Pantarlih tidak mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih dibawah 17 Tahun dan belum menikah, Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih.

Model pengawasannya adalah Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) setempat melakukan uji petik dengan mendatangi masing-masing rumah pemilih. Uji petik ditargetkan mengunjungi 10 kepala keluarga disetiap TPS.

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Ditetapkan Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara berpedoman pada prinsip akurat, mutakhir, perlindungan data diri, dan aksesibel.

Hasil data Pemilih hasil pemutakhiran yang dilaksanakan jajaran Bawaslu di tingkat Desa dilaporkan secara berjenjang ke KPU Kabupaten Karanganyar sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Pada hari Rabu, 05 April 2023 bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar, serta mengundang partai politik selaku peserta Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan dalam bentuk audit pada proses pleno rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hal itu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Disampaikan Handoko, terdapat perbedaan sistem penyusunan data pemilih menuju Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan pemilu yang lalu, karena ketentuan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Potensi permasalahan di jajaran KPU Karanganyar perlu memperhatikan akses informasi saat melaksanakan pemutakhiran data terhadap warga yang meninggal, pindah domisili, rubah status dari TNI Polri ke sipil atau sebaliknya, dan disabilitas. Penentuan pemilih Tidak Memenuhi syarat (TMS) maupun Memenuhi Syarat (MS) harus disertai adanya dokumen pendukung, bukan berdasar faktual.

Menyikapi hal di atas kemudian Bawaslu Karanganyar menyampaikan imbauan kepada KPU Karanganyar sebelum melaksanakan pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara. Imbauan memuat agar KPU memberikan penjelasan istilah-istilah status

pemilih seperti pemilih aktif, pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, dan pemilih potensial non KTP-el. Sehingga peserta yang hadir dapat mengerti dan memahami secara utuh.

Hasil Pencermatan dan Laporan Masyarakat Terhadap DPS, Diakomodir di DPSHP

KPU Kabupaten Karanganyar kembali melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Pleno dilaksanakan Jumat, 12 Mei 2023 bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar. Hadir secara langsung Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar, dan partai politik. Menanggapi imbauan Bawaslu Karanganyar secara lisan, kemudian KPU Karanganyar menyetujui dan akan melaksanakan atas masukan dan imbauan yang telah disampaikan Bawaslu Karanganyar.

Acuan sementara data pemilih setiap pelaksanaan Pemilu atau pemilihan tentu berdasarkan data pemilih tetap (DPT), walaupun terus mengalami penambahan dan pengurangan akibat data yang dinamis. KPU Karanganyar menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Hasil rekapitulasi Data Pemilih Hasil Perbaikan Akhir dijadikan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Rapat pleno dilaksanakan Rabu, 21 Juni 2023 bertempat di Jawa Dwipa Heritage Resort & Convention, Karanganyar. Dalam pleno tersebut kemudian menetapkan jumlah DPT untuk pemilu 2024 berjumlah 707.967 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 348.719 dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 359.248. (5G)



Penyelesaian Sengketa

Kebakkramat Raih Juara Favorit II Lomba Video Simulasi PSAP Tingkat Jawa Tengah

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kebakkramat meraih Juara Favorit II Lomba Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP) Tingkat Jawa Tengah. Sebagai bentuk apresiasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah, Kebakkramat menerima piagam penghargaan di Hotel Novotel, Semarang, 28 November 2023.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan mengatakan, video simulasi ini sebagai upaya untuk menyosialisasikan alur penyelesaian sengketa antarpeserta. Menurut Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi itu, semakin banyak viewer pada video tersebut artinya sosialisasi makin meluas.

Sementara Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Dini Tri Winaryani menambahkan, video berdurasi 15 menit itu menggambarkan proses sengketa yang terjadi antarpeserta politik, terkait pemasangan alat peraga kampanye. Dalam video tersebut dijelaskan alur penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah atau mediasi dengan Panwaslu sebagai mediatornya. Sebelum diikutkan dalam lomba di tingkat provinsi, sebanyak 17 video simulasi PSAP dari 17 Panwaslu Kecamatan diseleksi di tingkat kabupaten.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu, adanya instruksi pembuatan video simulasi sekaligus sebagai media pelatihan bagi pengawas di tingkat kecamatan dan desa, ketika menghadapi sengketa. Salah satu aspek penilaian video itu adalah kesesuaian dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sebelumnya juga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar dua lomba yang melibatkan Panwaslu Kecamatan. Pertama, lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan materi sosialisasi meliputi kerawanan waktu kampanye, kerawanan materi kampanye, Netralitas ASN, dan kerawanan tahapan kampanye yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Kedua, Lomba Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP).

Pada lomba ILM tingkat Kabupaten, Panwaslu Kecamatan Karanganyar menjadi terbaik I, terbaik II dimenangkan Panwaslu Kecamatan Karangpandan, dan terbaik III diperoleh Panwaslu Kecamatan Matesih. Sementara video terfavorit I direbut Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso dan Panwaslu Kecamatan Kerjo mendapatkan favorit II. Untuk nominasi pesan tersampaikan juara I diraih Panwaslu Kecamatan Jaten, posisi kedua Panwaslu Kecamatan Jumantono, dan pemenang ketiga pilihan juri jatuh kepada Panwaslu Kecamatan Jenawi.

Dalam lomba video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP) pemenang pertama atau terbaik I dimenangkan Panwaslu Kecamatan Kebakkramat, terbaik kedua Panwaslu Kecamatan Karanganyar, dan ketiga Panwaslu Kecamatan Colomadu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyerahkan piagam penghargaan kepada peserta Panwaslu Kecamatan yang telah memenangkan dua lomba tersebut disela-sela kegiatan apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024. Piagam tersebut diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk terus menghasilkan dan menghadirkan karya terbaiknya kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan sosialisasi pengawasan Pemilu yang partisipatif. (Wisnu)



Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI) membuka Rakernis Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Jadi Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar, Dini Tri Winaryani mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 Gelombang I.

Rakernis yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia (RI), di Redtop Hotel Jakarta itu berlangsung selama tiga hari itu, Senin-Rabu, 21-23 Agustus 2023. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya mengatakan, dalam proses Pemilu seluruh tahapan harus memiliki kepastian hukum. Karenanya, tiap terjadi pelanggaran dan sengketa harus dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai aturan hukum.

Meski diakuinya, tak seluruh Anggota Bawaslu di daerah berlatar belakang ilmu hukum. Namun, hal itu bukan alasannya untuk enggan mempelajari dasar-dasar hukum dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran.

Sementara Anggota Bawaslu RI, Totok

Hariyono yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mengatakan, kepastian hukum harus menjadi lentera dalam mengawal proses Pemilu Tahun 2024

Dia pun mengingatkan seluruh Anggota Bawaslu, khususnya yang mengampu divisi tersebut harus siap 24 jam, jika dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa secara cepat dan adil.

Hadir pula sebagai pemateri, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi. Pada Rakernis tersebut, seluruh peserta juga mendapat materi simulasi mediasi yang difasilitasi tenaga ahli dari Bawaslu RI.

Kegiatan tersebut diikuti Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu tingkat kabupaten/kota dari 10 provinsi di Indonesia. Mereka berasal dari Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. (Wisnu)

Bawaslu Gelar Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024



Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024, Selasa, 21 November 2023, di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara diikuti jajaran Sekretariat dan Pimpinan Bawaslu setempat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti dalam sambutannya mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas jajaran pengawas di semua tingkatan. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan materi dari Anggota Bawaslu, Sudarsono terkait perlunya kesiapan personil dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pada kesempatan tersebut dibahas pula soal tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang dikemas dalam video simulasi. Menurut Sudarsono, potensi sengketa bisa muncul ketika melewati tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota dan DPD.

Karenanya, lanjut dia, jajaran Bawaslu harus siap menerima permohonan sengketa dan menyiapkan sarana pendukung ketika harus melaksanakan mediasi maupun adjudikasi. Baik dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu (PSAP) atau pun penyelesaian sengketa proses pemilu (PSPP). (Wisnu)

Bawaslu Karanganyar Bahas Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Guna meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu, Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, di Aula Kantor Bawaslu Karanganyar, pada Jumat, 10 Maret 2023. Peserta kegiatan yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.

Sebagai pemateri dalam acara ini Edi Budi Susilo, Anggota Bawaslu Karanganyar selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian sengketa

pembukaan dan sambutan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Karanganyar kemudian penyampaian materi Materi yang dibahas yaitu Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dan sebagai pengawas pemilu perlu memahami dan mengerti aturan dan prosedur penyelesaian sengketa proses. Sebab, pengawas pemilu merupakan pihak pertama yang berhadapan dengan potensi sengketa antar peserta pemilu dan antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang bisa saja terjadi pada tahapan pemilu tahun 2024 saat ini. (Wisnu)

Optimalkan Pencegahan, Bawaslu Karanganyar Deklarasi Relawan Cyber



Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar deklarasi bersama untuk mencegah pelanggaran melalui konten media social. Kegiatan deklarasi dilaksanakan dua kali dengan mengajak penggiat media social yang ada di Kabupaten Karanganyar dan awak media. Deklarasi pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, (9/12/2023) dan kedua seminggu kemudian, Sabtu (16/12/2023).

Peserta deklarasi yang pertama meliputi komunitas penggiat media social yang ada di Kabupaten Karanganyar seperti, Patroli Cyber Bawaslu, Relawan Anti Hoax Karanganyar (Rahka), Info Warga Karanganyar (IWK), Mafindo Soloraya, Info Tawangmangu, Cinta Karanganyar (Cinka), Explore Karanganyar, Komunitas Pesbukers Karanganyar (KPK), dan Info Cegatan Karanganyar (ICK).

Deklarasi kedua juga melibatkan komunitas penggiat media social yaitu Cah Karanganyar Rantau (Cakra), Sedulur Jumantono Keren (Sejuk), Info Wong Karanganyar, Konco kenthel, Info warga Kebakkramat Karanganyar (IWKK), Sedulur Wong Kerjo (SWK), SPS Kebakkramat, Info Peduli Warga Mojogedang (IPWM), Insan Peduli Kasih (IPK), dan Sedulur Sosial Karanganyar (SSK). Selain melibatkan komunitas penggiat media social, Bawaslu juga mengajak awak media yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk turut dalam deklarasi tersebut.

Adapun teks deklarasi bersama sebagai berikut:

Kami awak media dan penggiat media social di Kabupaten Karanganyar menyatakan;

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sehat tanpa hoax dan Sara pada Pemilu 2024.
2. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait berita hoax dan Sara yang menyebabkan disintegrasi bangsa.
3. Siap melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar jika menemukan berita hoax, Sara dan ujaran kebencian.

Kegiatan deklarasi ini dikemas dalam acara rapat koordinasi (Rakor) gugus tugas pengawasan konten internet pada tahapan kampanye Pemilu tahun 2024. Turut menghadirkan beberapa narasumber yang konsen pada bidangnya diantaranya, akademisi ilmu komunikasi, penggiat Pemilu, dan Mafindo.



Optimalkan Fungsi Pencegahan, Bawaslu Karanganyar berikhtiar minimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu.

Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota merupakan Tugas Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Kamis (19/10/2023) melalui zoom meeting dan menghadirkan narasumber dari akademisi Universitas Diponegoro Semarang (Undip) dan wartawan solopos, Syiful Arifin yang dimoderatori Presenter TVRI Jawa Tengah, Hanny Nurmalita Anggadewi. pemantik diskusi Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Sosiawan.

Sosiawan dalam kesempatannya mengatakan bahwa media sosial merupakan penyumbang efektif bagi program 'edukasi kepemiluan, tetapi juga mengandung bahaya terkait penyebaran hoax. Sementara, menurut Lita Tyesta penegakan hukum kepada pelanggaran hoaks dan ujian kebencian pada Pemilu 2024, regulasi dan struktur penegakan hukumnya, harus sesuai dan mampu menghadapi perkembangan zaman utamanya berkaitan dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Dalam melawan hoaks dan hasutan kebencian, menurut Syiaful Arifin, baiknya edukasi masyarakat menekankan untuk berpikir kritis dan skeptisisme berkaitan dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan.

Selang beberapa hari kemudian, Bawaslu Karanganyar kembali melaksanakan diskusi zoom meeting pada hari Selasa (17/10/2023) yang bertajuk "Bahaya Politik Identitas Terhadap Bangunan Demokrasi Indonesia". Diskusi kali ini turut menghadirkan narasumber dari Wakil Rektor II Universitas Pekalongan, Achmad Soeharto. Menurut Soeharto Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjunjung tinggi nilai identitas nasional yang bersumber dari nilai persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Artinya, ia menegaskan kembali identitas antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang berbeda menjadi sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai bangunan kokoh demokrasi Indonesia.

Masih dari studio pojok pengawasan Bawaslu Karanganyar, sosialisasi melalui webinar kembali dibuktikan dengan fokus diskusi politik uang dalam perspektif antara rasywah atau sedekah yang diselenggarakan Kamis (13/4/2023). Narasumber yang



Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan memiliki strategi yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan atau langkah upaya optimal pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi ditemukannya dugaan pelanggaran. Sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya mengoptimalkan fungsi pencegahan, Bawaslu Karanganyar memanfaatkan media social melalui webinar dan youtube terus melakukan berbagai sosialisasi kepada jajaran pengawas Pemilu maupun masyarakat umum dengan menyuguhkan diskusi yang fokus membahas upaya penegakan hukum terkait ujaran kebencian dan hoax jelang Pemilu 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan



dihadirkan merupakan dosen ilmu politik dan pemerintahan Fisipol Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati dan dosen Ilmu Sosial Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Rofiq Mahfudz dengan moderator Hanif Maylasari. Kata Mada politik uang biasanya berasal dari pusaran lingkaran setan yaitu pemilihan ketua umum partai politik, pencalonan dan kampanye Pemilu, pemungutan penghitungan dan rekapitulasi surat suara. Sementara menurut Rofiq Mahfudz bahwa politik hukum haram hukumnya dan jauh dari cita-cita bangsa.

Persoalan pelik dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia, berkaitan dengan data pemilih yang terus mengalami perubahan kependudukan terlebih jika dilakukan update setiap menjelang tahapan Pemilu. Untuk itu, Bawaslu Karanganyar juga mengadakan diskusi via zoom khusus pengawasan pemutakhiran data pemilih dan integrasi data kependudukan, Kamis (6/4/2023). Adapun pemateri yang diundang tiada lain Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Kustiyono, Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, Ari Isafandi, dan Anggota Bawaslu Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho.

Handoko menyampaikan pengawasan penyusunan daftar pemilih sangat beda dengan pemilu 2019. Hal ini dikarenakan Bawaslu saat ini tidak memiliki data pembanding seperti DP4. Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan oleh Handoko kerja-kerja hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Karanganyar selama coklit berlangsung. (Vondra)

Diksi (Diskusi Demokrasi) melalui kanal youtube Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan narasumber dosen Ilmu Sosial dan Pokitik UNS, Akhmad Ramdhon dan dari internal Bawaslu Karanganyar sendiri Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ikhsan Nur Insfiyanto. Diskusi yang digelar Kamis, (16/03/2023) dalam rangka penyampaian laporan layanan informasi publik tahun 2022 dengan semangat membangun kepercayaan publik. Romdhon melihat secara umum bahwa infomasi publik merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Sehingga suatu lembaga harus memenuhi hak untuk memberikan informasi kepada publik.

Bawaslu Karanganyar Gelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024

Sударsono, S.Fil.I
Anggota Bawaslu Karanganyar

Pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 dimulai tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024. Peserta Pemilu 2024 dari tingkat pusat hingga daerah terus mempersiapkan diri dengan berbagai strateginya untuk merebut hati rakyat, puncaknya akan diketahui seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 siapa saja calon pemimpin dan calon wakilnya yang terpilih.

Pelaksanaan kampanye yang terhitung singkat (75 hari) dibandingkan Pemilu sebelumnya, tentu memiliki potensi besar adanya dugaan pelanggaran di masa kampanye. menyadari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 sehari sebelum dimulainya tahapan kampanye, Senin, (27/11/2023) bertempat di Alun-Alun Kabupaten Karanganyar.

Peserta Apel melibatkan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan yang meliputi Panwaslu Kecamatan di 17 Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di 177 Kelurahan/Desa. Terundang dalam kegiatan apel forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda), KPU, Kesbangpol, dan 18 peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Panwaslu Kecamatan dan PKD kata Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Piliastuti saat memimpin apel harus

bersiap diri menghadapi tahapan kampanye dan tingkatkan komunikasi-kolaborasi dengan stakeholder terkait dan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Paling penting, tambah Nuning, semua jajaran harus menjaga integritas dan marwah lembaga agar Bawaslu tetap menjadi lembaga yang terpercaya.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto dalam sambutannya meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Bawaslu, jangan sampai kemudian kepercayaan tersebut justru disia-siakan begitu saja. Selain itu, pada masa kampanye dan pencoblosan yang berbarengan dengan musim hujan, Panwaslu Kecamatan dan PKD juga diminta pandai-pandai menjaga kesehatan. Sebab kalau jajaran Bawaslu banyak yang sakit akan banyak kegiatan kampanye yang tidak diawasi. Sementara dari unsur kepolisian dan TNI juga menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Bawaslu dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Setelah apel siaga yang mengambil tema besar *'Dari Bumi Intanpari; Salam Damai Untuk Indonesia'* juga dilaksanakan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu damai di Kabupaten Karanganyar dan terakhir pelepasan balon sebagai symbol kesiapan pengawasan dan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Karanganyar.



Peserta Apel Siaga 364 orang dari Jajaran Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan



Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai



Tarian Nusantara



Deklarasi Pemilu Damai | 27 November 2023

Wujudkan Pemilu Inklusif, Bawaslu Gandeng Kelompok Disabilitas

Tim magang hibah mbkm UNS D4 Demografi Pencatatan Sipil

Bawaslu Karanganyar mengadakan kegiatan konsolidasi dengan kelompok penyandang disabilitas Kabupaten Karanganyar, pada Jumat (8/09/2023). Tujuan dari acara tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dari kelompok disabilitas agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat ramah terhadap mereka. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini diberikan agar mereka dapat menyalurkan hak suara mereka dengan setara dengan masyarakat lainnya. Kegiatan juga dihadiri Mahasiswa magang dari UNS yang melakukan penelitian terhadap pemilih Disabilitas di Karanganyar.



Bawaslu Aktifkan Lagi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat koordinasi Pengembangan/ Pembinaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di SFA Resto Karanganyar, Rabu (13/9/2023). Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Piliastuti, berharap program ini dapat memperkuat sinergi dalam mengawasi Pemilu Tahun 2024 dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. Anggota Bawaslu, Sudarsono mengharapkan kepala desa dan lurah dari beberapa desa dapat menjadi pelopor pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024.



Pemilih Pemula Digandeng Awasi Pemilu 2024

Pemilih pemula menjadi faktor penting dalam Pemilu 2024. Karenanya, Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama SMA Negeri Kerjo menyosialisasikan peran pemuda dalam pesta demokrasi. Acara diikuti 288 siswa Kelas X. Hadir sebagai pembicara sekaligus pemantik diskusi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, serta Anggota Bawaslu Dini Tri Winaryani dan Ikhsan Nur Isfiyanto.

Isu *money politic*, kebebasan memilih dan gerakan antihoaks menjadi topik yang menarik bagi para siswa. Mereka antusias menanyakan berbagai hal seputar pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu juga menekankan Mereka juga menekankan pentingnya pemantauan partisipatif pada pemilu 2024. Para siswa menunjukkan antusiasme yang besar dan



mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Masyarakat dan Ormas Diajak Awasi Tahapan Pencalonan

Bawaslu Karanganyar menggelar acara Sosialisasi Pemantauan Partisipatif Pemilu yang bertemakan Peran Masyarakat dan Organisasi dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Serentak, pada 27 Juli 2023, di Lor In Hotel, Colomadu. Peserta antara lain perwakilan organisasi, pengawas Pemilu, perwakilan partai politik, mahasiswa, dan Saka Adhyasta Pemilu Karanganyar.

Pembicara dalam acara tersebut adalah aktivis Pemilu, Fajar Saka, sekaligus advokat, dengan moderator Imam Al Ghozali Hide Wulakada, akademisi Universitas Surakarta. Fajar membahas tentang peran masyarakat dalam pemantauan partisipatif, antara lain sosialisasi informasi pemantauan pemilu, pemberian informasi awal dugaan pelanggaran, dan melakukan pemantauan komprehensif



pada masyarakat sekitar



Bawaslu Karanganyar Hadiri Sosialisasi & Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2024

Bawaslu Karanganyar menghadiri acara yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu Sosialisasi dan Edukasi Pemilu Pemilu Serentak Tahun 2024, senin (03/07/2023). Acara tersebut berlangsung di UNS Inn dan dihadiri oleh berbagai peserta seperti, Perangkat desa, Penyelenggara Pemilu, dan tokoh masyarakat. Pembicara dalam acara tersebut adalah Paryono, anggota Komisi II DPR, dan Romdhon, akademisi UNS. Topik yang dibahas antara lain pentingnya koordinasi antar penyelenggara pemilu dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ditegaskan bahwa pemilu 2024 sangat penting bagi konsolidasi demokrasi dan akan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional ke depan.



Bawaslu Karanganyar Libatkan Dharma Wanita Awasi Pemilu 2024



BawasluKra_Pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu terus dilakukan oleh Bawaslu. Pada kesempatan ini Kamis (8/06/2023) bertempat di RM Soewatu

Ngargoyoso, Bawaslu Karanganyar menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh Darma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar mengambil tema “Perempuan Bijak Ditahun Politik”.

Kesempatan tersebut Nuning Ritwanita Priliastuti (Ketua Bawaslu Karanganyar) menyampaikan materi mengenai peran wanita dalam mengawal demokrasi. “Kesempatan tersebut mengajak peserta yang hadir untuk bisa berperan dalam pengawasan pelaksana Pemilu 2024 selain itu juga untuk bisa mengajak warga disekitar mereka untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu 2024 nanti”ujar nuning

Harapan kedepan perempuan bisa menjadi benteng terdepan untuk mencegah terhadap pelanggaran Pemilu utamanya didalam keluarganya. Selain itu Bawaslu Karanganyar mengajak perempuan untuk aktif dalam melakukan pengawasan Pemilu dan berani untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran Pemilu yang berada disekitar mereka.

Bawaslu Karanganyar dan DPR RI Komisi 2 Lakukan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat diperlukan. Kali ini Selasa (24/07/2023) bertempat di plosor cafe Jumapolo dilakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu pada kesempatan tersebut sebagai peserta adalah Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan serta tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, dan Jumantono.

Hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Paryono (Anggota DPR RI Komisi 2) dan Nuning Ritwanita Priliastuti (Ketua Bawaslu Karanganyar)

Paryono menyampaikan bahwa tugas komisi 2 adalah sebagai pengawasan terhadap tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu serta penyelenggara Pemilu itu sendiri, selain itu juga membuat regulasi yang mengatur mengenai Pemilu itu sendiri. "partisipasi



masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan Pemilu". Ujar Paryono

Bawaslu Ajak Perempuan Aktif Awasi Pemilu

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang penting guna memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Menuju pemilu tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggandeng Bawaslu dan KPU kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan "Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan untuk sukses pemilu

serentak tahun 2024". Kegiatan bertempat di Aula PMI kabupaten Karanganyar pada Kamis (8/6/2023). Peserta kegiatan merupakan Ibu-ibu kelompok pengajian Al-Hidayah se-kabupaten Karanganyar. Sesi materi pertama oleh Kustiono, komisioner KPU divisi Perencanaan Data & Informasi. Ia menyampaikan betapa pentingnya peran perempuan dalam menentukan pemimpin melalui pemilu, karena Perempuan adalah tiang negara. Sesi materi kedua oleh Sudarsono, Anggota Bawaslu Karanganyar. Pada kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pengawasan Pemilu.

Diharapkan semua perempuan aktif dalam Kepemiluan baik sebagai Penyelenggara, Peserta ataupun sebagai Pemilih. Sebagai pemilih yang cerdas ayo kita awasi bersama Bawaslu untuk mewujudkan Pemilu yang Adil, Jujur dan bermartabat.



Gakkumdu Satukan Persepsi Soal Regulasi



Foto : M. Zaki (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karanganyar)
Jerold (Kapolres Karanganyar)
Ikhsan Nur (Anggota Bawaslu Karanganyar)
pada kegiatan Rakornas Gakkumdu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan langkah untuk mendapat legitimasi dari rakyat untuk menjalankan pemerintah. Melalui Pemilu yang demokratis warga negara menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya maupun wakilnya di parlemen.

Untuk melestarikan nilai-nilai demokrasi, maka pelaksanaan Pemilu secara langsung merupakan pilihan tepat. Rakyat dapat berdaulat dalam menentukan masa depan negaranya. Sesuai amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilu ini harus dilaksanakan secara sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Untuk mengatur pelaksanaannya disiapkan sejumlah perangkat hukum di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses demokrasi harus mengacu 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Adanya law enforcement atau penegakan hukum juga harus dibarengi dengan upaya peace maintenance atau menjaga perdamaian. Penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Pada penyelenggaraan Pemilu,

penegakkan hukum Pemilu dikawal dengan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Keberadaan Sentra Gakkumdu ini sesuai dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembentukannya juga merujuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Di Bumi Intan pari pembentukan Sentra Gakkumdu dikukuhkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 132/HK.01.01/K.JT-11/09/2023 tentang Perubahan Keempat Mengenai Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu.

Keputusan tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Karanganyar dan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Struktur organisasi Sentra Gakkumdu sendiri terdiri atas penasihat, pembina, koordinator dan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar.

Penasihat Sentra Gakkumdu dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kapolres Karanganyar, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar. Sementara Pembina Sentra Gakkumdu dijabat Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Data Informasi Kabupaten Karanganyar, Kasatreskrim Polres Karanganyar dan Kepala Seksi Tindak Pidana

UmumKejaksaan Negeri Karanganyar.

Adapun Koordinator Sentra Gakkumdu dijabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kepala Unit Reserse Kriminal pada Polres Karanganyar, Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Karanganya,

Pada Sentra Gakkumdu juga diperkuat anggota terdiri penyidik Reserse Kriminal Polres Karanganyar, Jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar, serta Anggota Bawaslu dan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Sebagai langkah antisipasi pelanggaran pidana, Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar terus memetakan potensi pelanggaran selama tahapan Pemilu melalui rapat koordinasi secara intens.

Koordinasi tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antara kepolisian, dan kejaksaan. Apalagi, penanganan pelanggaran pidana Pemilu dibatasi dengan tenggat waktu relative singkat yaitu 14 hari, sejak temuan atau laporan diregistrasi. Karenanya dalam penanganannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Melalui koordinasi yang intensif diharapkan dapat meminimalisasi adanya tafsir dan perberdaan presepsi dalam pemahaman penanganan atau mekanisme penanganan pelanggaran saat menghadapi tindak pidana Pemilu Tahun 2024.

Untuk memperkuat dan mempercepat penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, dibutuhkan dukungan dari seluruh jajaran pengawas untuk membantu dalam melengkapi saksi dan bukti. Karenanya jajaran pengawas perlu memahami mekanisme penanganan pelanggaran, utamanya dalam melengkapi syarat formil dan materiil.

Terkait hal tersebut, Sentra Gakkumdu juga telah terjun langsung ke 17 kecamatan untuk berkoordinasi dengan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD). Hal-hal teknis dalam membantu pengumpulan bukti, keterangan dan saksi juga disampaikan kepada jajaran pengawas, agar tak gagap ketika mendampingi warga membuat laporan ke Bawaslu. (Angga)





SDM Bawaslu Terampil dan Berdedikasi Jaga Pemilu

Pengembangan dan pematapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karanganyar sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini penting untuk menyambut tahapan pemilu 2024 yang terus mendekati hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Dalam konteks persiapan Pemilu 2024, peran SDM di lingkungan Bawaslu Karanganyar menjadi kunci dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan efektivitas lembaga pengawas pemilu. Kesiapan SDM Bawaslu Karanganyar menjadi elemen penting dalam mengawasi dan memastikan jalannya Pemilu 2024 yang adil, transparan, dan demokratis. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi langkah krusial untuk memastikan jajaran Bawaslu memiliki pengetahuan yang memadai terkait regulasi pemilu, teknologi, dan strategi pengawasan.

Selain itu, kerjasama yang erat dengan pihak eksternal seperti KPU, aparat keamanan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum akan mendukung pencapaian tujuan bersama dalam mengawasi proses pemilu. Sinergi yang baik akan memperkuat integritas dan independensi Bawaslu. Selain itu Pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu

dalam pengawasan pemilu juga menjadi fokus utama. Implementasi sistem informasi dan teknologi yang canggih akan memungkinkan pelaporan lebih cepat, akurat, dan efisien terkait potensi pelanggaran pemilu.

Pengembangan mekanisme penanganan konflik juga penting untuk memastikan proses pemilu berlangsung dengan damai. Pembentukan tim yang responsif dalam menangani potensi konflik dapat mengurangi potensi ketegangan dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Evaluasi secara berkala terhadap proses pengawasan yang dilakukan akan memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, memperkuat SDM di Bawaslu Karanganyar merupakan fondasi krusial dalam menjaga lembaga yang konsen dalam melakukan pengawasan pemilu.

SDM yang unggul tidak hanya memiliki kemampuan tentang pengetahuan dan aturan pemilu, tetapi juga dapat menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Peran SDM yang solid dan terlatih dengan baik akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul selama periode pemilu. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi pelanggaran serta konflik dengan tepat akan menjadi landasan bagi kepastian pemilu yang bersih, terbuka, dan dipercayai oleh masyarakat. (Dayinta)



Bawaslu Awasi Pendaftaran Peserta Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu. Secara teknis hal itu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengawasan yang salah satunya pada tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, selain itu juga melakukan pengawasan terhadap keputusan KPU dan Bawaslu. Sebelum kita masuk ke tahapan pencalonan, mari kita bahas terkait dengan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024.

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berlangsung pada akhir Tahun 2022 yang lalu. Partai politik yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu menjalani serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi, hingga penetapan. Dari rangkaian tahapan tersebut, sejumlah 18 partai politik lolos untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2024.

Pengawasan Syarat Minimal Dukungan DPD

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berperan dalam mengawasi perolehan syarat minimal dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024. Dimulai dari tahapan verifikasi syarat minimal dukungan DPD yang melibatkan jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota hingga kecamatan. Kami melaksanakan pengawasan bersama dengan pengawas pemilu kecamatan dimana lokasi tersebar di beberapa kecamatan.

Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD

Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar diawali dengan pengumuman pendaftaran pengajuan bakal calon. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Usai pengajuan, maka masuk ke tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan.

Pada tahap tersebut, Bawaslu turut mengawasi dengan berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar sekaligus mengamati melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Lalu, tahapan masuk ke pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon (Bacalon). Berkas pengajuan perbaikan oleh partai politik peserta pemilu yang masuk diverifikasi oleh pihak verifikasi KPU Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) serta penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Total Bacalon yang memenuhi syarat hingga penetapan DCT pada 3 November yaitu sebanyak 460 nama.(rof)



Mengawal Inklusi dalam Pesta Demokrasi

Moh. Abdi Syaputra Lasandang
Mahasiswa UNS

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Setiap warga negara, termasuk yang memiliki disabilitas, harus memiliki akses yang sama dalam proses Pemilu baik sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 5, yang menyebutkan bahwa *“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”*

Tak hanya itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilu telah mengeluarkan sederet Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam rangka memastikan hak – hak pemilih disabilitas diakui dan dilindungi. Regulasi tersebut menekankan

pada prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan partisipasi aktif dalam proses pemilihan.

Namun, tantangan yang dihadapi pemilih disabilitas sangat beragam. Seringkali mereka merasa diabaikan serta menghadapi hambatan yang signifikan. Salah satunya dalam aspek aksesibilitas fisik, informasi, pendidikan pemilih, dan kurangnya kampanye yang inklusif. Padahal, proses inklusi itu harus mencakup seluruh tahapan Pemilu. Partisipasi politik mereka penting dalam memberikan masukan berharga.

Pada Pemilu Tahun 2024 data pemilih disabilitas di Kabupaten Karanganyar berjumlah 5.315 orang yang tersebar di 17 kecamatan, dengan berbagai klasifikasi jenis disabilitas. Dalam memastikan Pemilu yang inklusif, kita perlu menyadari bahwa disabilitas memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pelayanan khusus.

Perlunya tambahan pengetahuan serta pembelajaran perlakuan pada petugas pemungutan suara merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang inklusif serta jaminan kesetaraan hak politik dan dukungan publik yang ramah disabilitas.

Pemilu harus memasukkan semua kelompok masyarakat, sehingga mencerminkan keanekaragaman yang ada. Ini berarti menyediakan akses yang mudah ke tempat pemungutan suara dan memastikan bahwa pemilih dengan disabilitas memiliki alat bantu yang mereka butuhkan.

Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karanganyar telah memperhatikan berbagai aspek untuk mendukung terwujudnya inklusifitas. Namun demikian tidak bisa dipungkiri masih ada pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas yang berakibat pada kesulitannya untuk menggunakan hak suara,

selain itu masih adanya kemungkinan tidak terakomodasinya pemilih disabilitas dalam Data Pemilih Tetap (DPT) hal ini diakibatkan karena DPT masih perlu untuk terus dievaluasi karena dengan memiliki data yang akurat tentang penyandang disabilitas, KPU dapat lebih efektif dalam mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memastikan partisipasi aktif dan setara dari penyandang disabilitas dalam proses pemilihan. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun demokrasi inklusif. Hal tersebut memberikan hak yang setara bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus meningkatkan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan. Bawaslu Karanganyar beberapa kali telah melakukan sosialisasi serta diskusi bersama dengan kelompok organisasi disabilitas di Bumi Intanpuri.

Hal ini menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan, tanggapan dan kritikan yang membangun untuk keberlangsungan Pemilu ke depan. Tidak hanya itu Bawaslu juga telah memberikan kesempatan bagi warga dengan disabilitas agar bisa menjadi penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan.

Namun ini masih menjadi pekerjaan rumah karena ada kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi, minimal SMA. Sementara sebagian besar warga difabel tak mendapat pendidikan yang cukup tinggi. Hal itu tak lepas dari adanya stigma di masyarakat, bahwa ketika memiliki keluarga dengan kekurangan

dianggap sebagai hal yang tabu. Karenanya keberadaan mereka harus disembunyikan, sehingga tidak perlu mendapat pendidikan tinggi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan adalah langkah penting dalam memastikan proses demokrasi yang transparan dan adil. Dengan harapan untuk pemilu yang lebih inklusif dan ramah terhadap disabilitas di masa mendatang, melibatkan komunitas disabilitas dalam kehidupan politik menjadi kunci. Disabilitas bukanlah hambatan, tetapi bagian integral dari pemilu dan faktor penting dalam suksesnya penyelenggaraan demokrasi tersebut.

Mewujudkan demokrasi yang setara untuk semua adalah tujuan bersama yang harus terus diperkuat. Dengan upaya bersama dari pemerintah, KPU, Bawaslu dan masyarakat, Pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mewujudkan aksesibilitas dan partisipasi aktif pemilih disabilitas dalam proses demokrasi. Menciptakan pemilu yang inklusif adalah tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat yang setara dan adil bagi semua warganya.



Moh. Abdi Syahputra Lasandang
Mahasiswa UNS

GALERI B KABUPATEN K



Bawaslu Karanganyar Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Kategori Informatif



Bawaslu Karanganyar Hadiri Rakor Lintas Sektoral



Bawaslu Karanganyar Hadiri Serah Terima Kirab Pemilu Tahun 2024



Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Menulis



Patroli Kawal Hak Pilih

BAWASLU KARANGANYAR



Bawaslu, Kepolisian, KPU Perkuat Koordinasi Hadapi Pemilu Tahun 2024



Anggota Bawaslu RI Kunjungi Bawaslu Karanganyar guna Mantapkan Pengawasan Pemilu Tahun 2024



Latihan Sispamkota (Sistem Pengamanan Wilayah Kabupaten/Kota) Guna Antisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahapan Pemilu 2024



Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Peringati HUT Bawaslu ke 15



Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai Coolingsystem Menuju Pemilu Damai Tahun 2024



Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula

Sajak Demokrasi

Dignity Persatuan

14 Februari 2024 tinta sejarah yang dinanti
Hari dimana seluruh rakyat dinanti
Ditempat hiruk pikuk TPS berdiri
Dengan segala modal hegemoni yang dimiliki

14 Februari 2024 hari dimana hak pilihnya dibully
Dengan konsensus entah mengerti atau memahami
Tentang pendirian, kebulatan, tekad dan cita yang hendak dicapai
Melangkah dan meninggalkan segala aktivitas untuk penentu demokrasi

14 Februari 2024 menit dimana angka diplototi
Terkadang moral dipertaruhkan hanya klaim sana sini
Sejatinya ini bukan pertumpahan melainkan jalan untuk memperbaiki bangsa ini
Karena demokrasi lahir bukan hanya dalam hitungan satu hari

14 Februari 2024 dinamika kepemimpinan akan terjadi
Dignity Persatuan akan diuji
Apalagi isu reformasi hadir kembali
Pemilu kali ini harus hadir sebagai transisi kemuliaan demokrasi
Sebagai restorasi kedaulatan bahwa keadilan harus ditegakkan ditengah berbagai
macam isu feodal

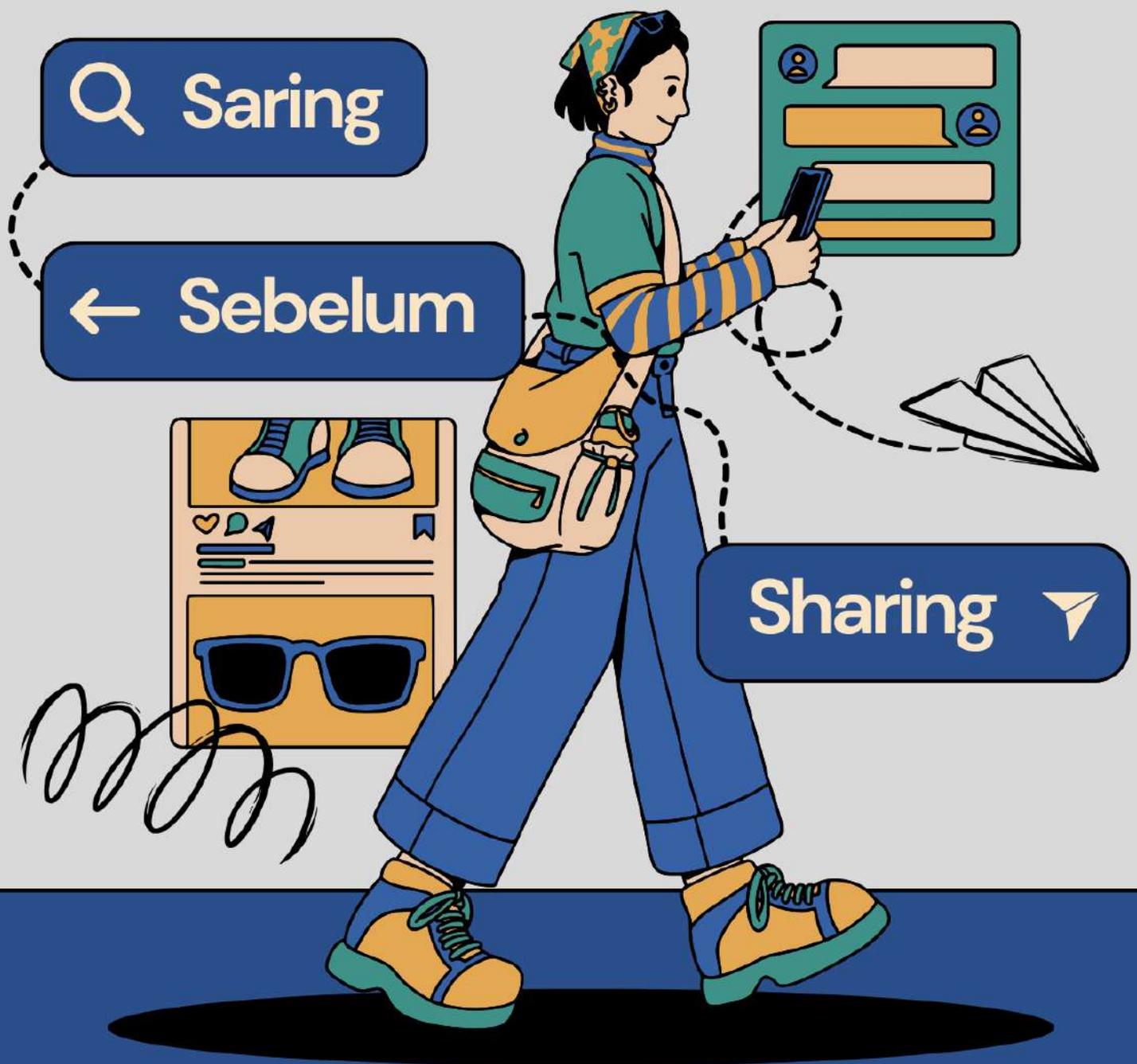
Aris Arrifqi



(aris_arrifqi)



STOP HOAKS



Dengan langkah sederhana ini, kita dapat mencegah penyebaran hoaks dan memastikan bahwa informasi yang kita sebar di dunia maya adalah akurat dan bermanfaat. Ayo Sukseskan Pemilu 2024 Tanpa Hoaks !

Kalender 2024

01 2024 JANUARI

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

02 2024 FEBRUARI

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

03 2024 MARET

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

04 2024 APRIL

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

05 2024 MEI

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

06 2024 JUNI

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

07 2024 JULI

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

08 2024 AGUSTUS

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

09 2024 SEPTEMBER

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

10 2024 OKTOBER

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

11 2024 NOVEMBER

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

12 2024 DESEMBER

Sen	Sel	Ra	Ka	Ju	Sab	Mi
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



Jl. Kertapati No. 1 Badranasri | Cangkanan | Karanganyar | 57712